

PERAN INDONESIA SEBAGAI KEKUATAN MENENGAH DALAM G20 DI TENGAH DISRUPSI GEOPOLITIK KONFLIK RUSIA-UKRAINA¹

THE MIDDLE POWER ROLE OF INDONESIA IN G20 AMIDST GEOPOLITICAL DISRUPTION OF THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

Totok Sudjatmiko, Meilinda Sari Yatusman, Firman Budianto, Tri Rainny Syafarani

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat, Indonesia 10340

E-mail: toto007@brin.go.id; meil002@brin.go.id; firm010@brin.go.id; trir002@brin.go.id

Diterima: 5 Agustus 2022; direvisi 25 Oktober 2022; disetujui 10 November 2022

Abstract

In the global network structure, the condition of a shrinking world has led to increased interactions between states. This circumstance increases the interconnectedness and interdependence of state actors. There are currently three global conditions that must be addressed: (1) the impact of the Russia-Ukraine conflict, which has turned into a protracted war with global repercussions; (2) the existence of the G20; and (3) the role of the middle power's state, particularly Indonesia, in protecting its national interests. As a middle power and this year's G20 president, Indonesia has a great opportunity to contribute to global circumstances while maintaining its position to protect national interests amidst global interconnectedness and interdependence. Using qualitative methods, this study aims to examine Indonesia's roles as a middle power in the G20 at a time when the geopolitical disruption of the Russia-Ukraine conflict is underway. The results indicate that Indonesia, as a middle power and president of the G20, has played a considerable role as a mediator in response to the ongoing Russia-Ukraine conflict and as a bridge builder between developing and developed countries throughout the G20 forum as a multilateral arena. These are undertaken by Indonesia to pursue its national and global interests amidst geopolitical disruption.

Keywords: G20, Geopolitical Disruption, Indonesia, Middle Power, Russia-Ukraine Conflict

Abstrak

Dalam struktur jaringan global, kondisi menyusutnya dunia telah menjadikan interaksi negara-negara di dunia semakin meningkat. Hal ini menjadikan aktor-aktor negara semakin saling terhubung dan saling bergantung. Pada kondisi tersebut, tiga kondisi global yang patut menjadi perhatian dunia saat ini, yaitu: (1) dampak konflik Rusia-Ukraina, yang telah menjadi perang berkepanjangan dan berdampak global; (2) keberadaan G20; (3) peran negara kekuatan menengah, khususnya Indonesia, dalam melindungi kepentingan nasional. Sebagai kekuatan menengah dan pemegang Presidensi G20 tahun ini, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk dapat berperan dan berkontribusi dalam kondisi global tersebut dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasionalnya di tengah kondisi global saat ini. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melihat peran Indonesia di tengah disrupsi geopolitik konflik Rusia-Ukraina dalam posisinya sebagai kekuatan menengah di G20. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai kekuatan menengah dan pemegang presidensi G20, telah memainkan peran sebagai mediator dalam merespons konflik Rusia-Ukraina dan pembangun jembatan interaksi (*bridge builder*) antara negara berkembang dan negara maju melalui forum G20 sebagai forum multilateral. Hal ini dilakukan oleh Indonesia guna memperjuangkan kepentingan nasional dan global di tengah disrupsi geopolitik.

Kata Kunci: G20, Disrupsi Geopolitik, Indonesia, Konflik Rusia-Ukraina, Kekuatan Menengah

¹ Semua penulis adalah kontributor utama.

Pendahuluan

Era globalisasi membawa dunia menjadi semakin terkoneksi. Fenomena konektivitas ini telah membawa dunia menjadi semakin menyusut (*shrinking world*). Terminologi *the shrinking world* dapat dipahami sebagai kondisi dunia yang semakin menciut akibat globalisasi dan semakin terhubungnya perekonomian dunia (Krueger, 2004). Dalam konteks geopolitik, fenomena *the shrinking world* membawa konsekuensi timbulnya gangguan atau disrupsi dari konflik di suatu negara atau kawasan akan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap dunia internasional, termasuk aktor-aktor negara di dalamnya.

Kondisi ini membawa tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia, sehingga sulit bagi mereka untuk menghadapinya secara individual. Terlebih, tantangan global membawa muatan kompleksitas masalah. Di sisi lain, konektivitas yang ada dapat membantu dalam mendorong efisiensi, kemudahan, dan kemajuan dalam interaksi yang dilakukan. Kegagalan menghadapi tantangan global yang kompleks berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun global, sehingga kondisi ini mendorong terbentuknya G20 dengan karakteristik pemerintahan global (*global governance*) yang unik dan memiliki mekanisme kepemimpinan bersama.

Perilaku, peran, dan fungsi Indonesia sebagai kekuatan menengah atau *middle power* dalam G20 menjadi penting. G20 atau *The Group of Twenty* merupakan forum tidak mengikat yang dibentuk pada tahun 1999 untuk merespon krisis keuangan global yang terjadi tahun 1997-1998. G20 beranggotakan 19 negara, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan satu organisasi supranasional, yaitu Uni Eropa (UE). Pada awalnya, G20 dibentuk sebagai respons atas terjadinya krisis finansial yang terjadi di akhir tahun 1990-an, munculnya pengaruh dari kekuatan ekonomi baru, dan terbatasnya peran formal negara anggota G7 dan G8 yang kurang dianggap dalam pengambilan keputusan (Gilman, 2015).

Seiring dengan perkembangannya, G20 juga fokus pada usaha untuk mewujudkan stabilitas keuangan internasional dan berkembang menjadi forum yang tidak hanya membahas isu keuangan saja, tetapi meluas ke isu-isu global di bidang non-keuangan. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80 persen perekonomian dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia (G20, 2022). G20 berperan utama dalam penciptaan stabilitas ekonomi global, termasuk pencegahan terjadinya krisis finansial. Meskipun G20 bersifat tidak mengikat, rumusan kebijakan yang disepakati dalam forum-forum di G20 tetap diperhitungkan dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan di tingkat negara. G20 dengan sifatnya yang unik dapat menjadi arena yang strategis bagi Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada untuk mengartikulasikan kepentingan nasional sebagai kepentingan global. Selain itu, Indonesia dapat memastikan kesepakatan yang dihasilkan pada G20 dapat diimplementasikan oleh Indonesia untuk kepentingan dan pembangunan nasional. Tentunya, peran Indonesia dalam G20 ini juga tidak terlepas dariantisipasi disrupsi geopolitik konflik Rusia dan Ukraina. Operasi militer Rusia terhadap Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022 dan masih berlangsung hingga saat artikel ini dituliskan dapat dikatakan sebagai respons Rusia setelah menahan diri terhadap ancaman dari dunia Barat sejak lama. Konflik Rusia dan Ukraina tidak bermula dari pengakuan Rusia terhadap Republik Donetsk dan Luhansk belakangan ini, tetapi sejarah panjang konflik yang sudah terjadi dari tahun 2013 silam, yakni: protes masyarakat Ukraina (*Euromaidan*) akibat kegagalan penandatanganan kerja sama dengan UE (McCarthy 2013), aneksasi Krimea di tahun 2014 (Korovkin & Makarin, 2019), dan ekspansi NATO secara perlahan ke wilayah Timur (Statistic Research Department, 2022a).

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran yang diinginkan dan dimainkan Indonesia sebagai *middle power* dalam G20 di tengah disrupsi geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak luas pada kondisi perekonomian global dan nasional. Berangkat dari permasalahan geopolitik Rusia-

Ukraina tersebut, Indonesia perlu menjaga kepentingan nasionalnya dan mengambil peran strategis sebagai negara berkekuatan menengah, khususnya pada G20, baik dalam memainkan peran sebagai ketua maupun anggota tetap forum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk memperdalam analisis terkait diskursus peran Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam mengelola kepentingan nasional di tengah disrupsi geopolitik di forum G20. Menurut Creswell (1994), metode ini merupakan proses untuk memahami permasalahan sosial berdasarkan gambaran keseluruhan, rangkaian kata, pandangan para informan yang terjadi secara natural. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, menggali data yang sifatnya relatif tidak terstruktur (*unstructured data*), menganalisis kata, dan sering kali menggunakan beberapa kasus sebagai komparasi, telaah mendalam atau variabel kontrol untuk memahami beragam interaksi sosial (Hammersley, 2013; Bryman, 2008; Sandelowski, 2004). Wawancara dilakukan dengan Ditjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI dan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan beberapa akademisi dari universitas di Indonesia. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi literatur melalui telaah mendalam terhadap buku, jurnal akademik, laporan, artikel media massa, dan situs resmi pemerintahan, khususnya terkait peran presidensi dan keanggotaan Indonesia dalam G20 serta perkembangan konflik Rusia-Ukraina.

Konsep Kekuatan Menengah (*Middle Power*)

Kategorisasi kekuatan menengah pertama kali mengemuka dalam teori Hubungan Internasional modern *Power Transition Theory* yang diperkenalkan oleh Organski pada tahun 1958. Teori tersebut mendefinisikan hierarki internasional ke dalam empat tingkat, yaitu kekuatan dominan (*superpower*), kekuatan besar (*great power*), kekuatan menengah (*middle*

power), dan kekuatan kecil (*small power*). Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh Robertson (2017), cukup sulit untuk memberikan definisi yang pasti untuk kekuatan menengah mengingat kategori ini dapat mengacu pada banyak negara dengan berbagai karakteristik. Salah satu cara mendefinisikan apakah suatu negara termasuk kekuatan menengah adalah dengan melihat tiga hal (Holbraad, 1971), yaitu: lokasi mereka yang berada di antara sistem kekuatan besar; ukuran mereka yang berada di antara kekuatan besar dan kekuatan kecil, dan posisi mereka yang berada di antara dua kutub sistem ideologis dan politis.

Secara umum, studi terdahulu memberikan definisi kekuatan menengah sebagai kelompok negara yang bukan termasuk negara kekuatan besar maupun kecil dalam hal kekuatan, kapasitas, maupun pengaruh internasional (misal: Cooper, 2011; Jordaan, 2003). Konsep kekuatan menengah dijelaskan sebagai negara yang masih mampu memainkan peran penting secara regional serta memberikan pengaruh pada tingkat tertentu di urusan global, meskipun bukan tergolong sebagai kekuatan global utama (Cooper, 2011). Dengan demikian, kekuatan menengah dapat dipahami sebagai negara yang memiliki pengaruh yang lebih besar daripada negara-negara kekuatan kecil, namun belum sampai pada level kekuatan besar.

Lebih lanjut, kekuatan menengah memiliki beberapa karakteristik yang membedakan mereka dari kekuatan lain dalam hierarki internasional. Karakteristik ini pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana mereka menjalankan politik luar negerinya. Salah satu karakteristik yang paling jelas dari kekuatan menengah, sebagaimana diungkapkan Cooper (2011), adalah adanya kecenderungan bahwa mereka lebih memilih bekerja melalui institusi multilateral atau koalisi *ad hoc* dengan negara-negara yang bervisi sama dibandingkan memperjuangkan kepentingan mereka secara unilateral. Kecenderungan terhadap multilateralisme ini terlihat jelas untuk isu-isu global mengingat kekuatan menengah seringkali merupakan aktor penting di tingkat lokal yang dapat menggunakan taktik kekuatan besar di level regional (Cooper, 2011). Sebagai

implikasinya, kekuatan menengah mempunyai kecenderungan untuk lebih suka bekerja melalui pembangunan koalisi (*coalition building*) (Soward, 1963; Cooper, 2011; Robertson, 2017) serta berorientasi untuk menciptakan kohesi dan stabilitas di sistem internasional (Jordaan, 2003), dua hal yang merupakan karakteristik berikutnya dari kekuatan menengah.

Sebagai implikasinya, kekuatan menengah seringkali memfokuskan politik luar negerinya pada resolusi konflik dalam pengertian yang luas, dengan cara turut berpartisipasi aktif dalam perundingan, yang biasanya dilakukan melalui saluran-saluran dan institusi multilateral (Jordaan, 2003). Praktik politik luar negeri kekuatan menengah, dengan demikian, dapat dimaknai sebagai upaya mereka untuk mencari solusi multilateral bagi permasalahan-permasalahan internasional, mendorong kompromi, dan biasanya, untuk menjadi solusi atas permasalahan di tingkat internasional (Cooper, Higgot, & Nossal, 1993). Dalam praktiknya, kekuatan menengah biasanya mengadopsi gaya aktivis di mana mereka terlibat lebih banyak dalam situasi konflik dibandingkan negara non-kekuatan menengah dengan komposisi profil yang mirip (Jordaan, 2003). Kekuatan menengah juga secara selektif menunjukkan kepemimpinan dalam upaya penyelesaian permasalahan global dengan cara berusaha menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang berselisih (Jordaan, 2003).

Karakteristik kekuatan menengah berikutnya terletak pada kecakapan manajerial yang mereka miliki (Henrikson, 1997). Kecakapan manajerial kekuatan menengah, menurut Henrikson (1997), dapat dimaknai sebagai kemampuan praktis mereka untuk menentukan arah dan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan di level internasional, terutama dalam konteks institusional. Dalam melaksanakan perannya sebagai manajer, lebih lanjut, kekuatan menengah tidak hanya perlu berperan sebagai negosiator, melainkan juga sebagai mediator (Henrikson, 1997).

Henrikson (1997) menunjukkan tiga fungsi mediasi yang dapat dimainkan oleh kekuatan menengah, antara lain: konsiliasi,

interkoneksi, dan integrasi. Ketiga fungsi mediasi ini dapat dijalankan di dalam institusi, antar-institusi, maupun luar institusi, serta dapat bersifat multilateral, plurilateral, atau unilateral. Masih menurut Henrikson (1997), terdapat tiga jenis diplomasi mediator, yaitu, *good office* yang mengarah pada konsiliasi; *bridge building* yang bertujuan menghubungkan dua pihak yang sebelumnya terputus; dan yang paling penting, *planetary management*, yang bertujuan untuk menciptakan integrasi pada sistem internasional. Negara mediator yang berperan sebagai *planetary manager* perlu memiliki kecakapan teknis yang baik untuk menciptakan solusi yang sifatnya kolaboratif.

Lebih lanjut, kekuatan menengah dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu kekuatan menengah tradisional dan *emerging*. Kekuatan menengah tradisional biasanya merupakan negara yang maju secara ekonomi, namun bukan termasuk negara yang punya pengaruh kuat di kawasan sekitarnya. Sebaliknya, kekuatan menengah *emerging* seringkali merupakan negara yang punya pengaruh yang kuat dan dominan di lingkup regional meskipun mereka merupakan negara *semi-peripheral* (Jordaan, 2003). Berangkat dari definisi dan berbagai karakteristik tersebut, artikel ini memposisikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah di dunia.

Indonesia sebagai Kekuatan Menengah

Sejak 2013, Indonesia termasuk dalam 16 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia (Santikajaya, 2013). Indonesia memenuhi kategori kekuatan menengah berdasarkan posisinya secara geografis, identitas, dan perilakunya sebagai aktor internasional yang mendukung multilateralisme dan mediator perselisihan (Kusumaningprang, 2017).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa pemerintahannya di tahun 2014 menetapkan empat prioritas kebijakan luar negeri, yang salah satunya adalah meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dalam diplomasi *middle power*. Pada era Jokowi,

diplomasi kekuatan menengah Indonesia ditunjukkan dalam program konektivitas besar-besaran dengan mengembangkan konsepsi poros maritim dunia (*Global Maritime Fulcrum* atau GMF). Proyek GMF ini membuat Indonesia tampak membuka peluang investasi lebih besar dengan Tiongkok, yang memberikan tantangan tersendiri bagi *middlepowermanship* Indonesia. Di satu sisi, kedekatan dengan Tiongkok dapat mendorong pembangunan infrastruktur strategis yang memperkuat kapabilitas ekonomi Indonesia. Di sisi lain, secara politis dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan kedekatan Indonesia dengan salah satu aliansi kekuatan dunia, padahal Indonesia menganut prinsip luar negeri bebas aktif yang selama ini mengedepankan *dynamic equilibrium* dengan memperkuat hubungan regional (Sriyanto, 2018; Susanto, 2022).

Perilaku Indonesia sebagai negara kekuatan menengah pada masa Jokowi dianggap lebih ambigu dibandingkan pada masa sebelumnya. Jokowi menggunakan pendekatan asertif yang seolah ingin lepas dari konstruksi “*good international citizen*” yang patuh terhadap konstruksi hegemonik dalam politik internasional, seperti yang dijalankan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Alvian, et al., 2018). Pada masa SBY, diplomasi Indonesia lebih mengutamakan pendekatan *relational power* sesuai tuntutan dan harapan masyarakat internasional tentang bagaimana suatu negara seharusnya berperilaku. Diplomasi kekuatan menengah dalam era SBY dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan tata internasional. Misalnya, dalam menangani kasus sengketa perbatasan Ambalat, narasi diplomasi selalu dalam upaya mencari cara damai, di tengah tekanan domestik agar Indonesia bersikap lebih tegas. Tujuan pendekatan sebagai *good international citizen* ini adalah agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga tanpa perlu memicu kecaman internasional (Alvian et al., 2018).

Pada pemerintahan Jokowi, pendekatan asertif justru dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia lebih independen dalam menentukan sikapnya. Misalnya, dalam isu

teritori, Jokowi dengan tegas menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan Indonesia (Alvian et al., 2018). Meski memicu pro dan kontra dari masyarakat internasional, Jokowi tetap “tanpa kompromi” melindungi wilayah kedaulatan. Berbeda dengan SBY yang tampak lebih hati-hati menjaga kepantasan status dan perilaku Indonesia sebagai negara yang bersahabat, Jokowi tampak mengambil sikap yang lebih kontroversial dengan menegaskan independensinya dalam diplomasi *middle power* Indonesia yang bergerak ke arah *meta-power*, yaitu sebagai aktor yang mendefinisikan normalitas baru yang diikuti aktor-aktor lainnya (Alvian, et al., 2018).

Saat ini, Indonesia dianggap sebagai *emerging middle power country*, bahkan Indonesia banyak disebut sebagai *a rising middle power* (Santikajaya, 2013). Namun demikian, meskipun Indonesia sudah tidak lagi bermain dalam kerangka negara berkembang, posisinya masih belum bisa bersanding dengan negara maju. Di dalam keanggotaan G20, posisi Indonesia sebagai *emerging country* dianggap satu level dengan BRICS, tetapi Indonesia tidak bisa masuk dalam keanggotaan BRICS padahal potensi Indonesia cukup besar (Susanto, 2022). Ini menunjukkan bahwa “*the rise of Indonesia is led by the country’s prominence and lagged by its performance*”, yaitu meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah lebih maju, namun posisi “*Indonesia’s rise*” itu lebih dilihat berdasarkan potensi di masa depan alih-alih berdasarkan kinerja Indonesia di masa lalu (Emmerson, 2012).

Mengingat keunikan perilaku Indonesia sebagai kekuatan menengah di kancah internasional, maka peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dan anggota tetap ke depannya menjadi tantangan dan peluang tersendiri terutama dengan adanya disrupsi geopolitik Rusia-Ukraina.

Disrupsi Geopolitik Konflik Rusia-Ukraina

Operasi militer Rusia terhadap Ukraina yang dilakukan sejak 24 Februari 2022 dapat dikatakan sebagai respons Rusia setelah

menahan diri terhadap ancaman dari dunia Barat sejak lama. Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet sampai dengan adanya disintegrasi pada tahun 1991 yang mengakibatkan perpecahan dan kemerdekaan negara-negara di dalamnya. Sejak saat itu, Rusia berusaha untuk tetap mempertahankan pengaruh adidaya di wilayah Eropa Timur, khususnya di negara-negara pecahan Uni Soviet, termasuk Ukraina. Serangan oleh pasukan militer Rusia telah diluncurkan ke beberapa kota besar di Ukraina, seperti Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy, Olenivka, dan ibukota Kyiv (Statista Research Department, 2022b). Konflik ini menjadi sorotan dunia internasional mengingat kapasitas militer yang dimiliki oleh Rusia dan Ukraina tidak sepadan antara satu sama lain. Faktanya, jumlah anggota militer Rusia adalah empat kali lebih besar daripada Ukraina dan Rusia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia di tahun 2021, yakni hampir mencapai 66 milyar dollar AS (Statista Research Department, 2022b). Akibat dari Perang Ukraina dan Rusia ini, sampai dengan 25 Juli 2022, sekitar 4,9 juta orang melewati perbatasan dari Ukraina menuju Polandia untuk menyelamatkan diri dan menghindari konflik (Statista Research Department, 2022b) kecuali para pria warga negara Ukraina yang perlu menunaikan kewajiban negara sebagai pasukan perang tambahan.

Motivasi Rusia terhadap tindakan operasi militer ini belum dapat diketahui secara pasti. Bagi Rusia, serangan yang dilakukan kepada Ukraina bukan sebagai bentuk invasi melainkan operasi militer dan segala bentuk serangan militer yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk melindungi warga di wilayah Donbas dari Pemerintahan Ukraina (Statista Research Department, 2022a). Sebelumnya, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan secara sepihak bahwa Rusia mengakui kemerdekaan para separatist Republik Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR) pada 21 Februari 2022. Namun demikian, konflik yang terjadi pada Ukraina dan Rusia tidak bermula dari pengakuan Rusia terhadap Republik Donetsk dan Luhansk, tetapi sejarah panjang konflik yang sudah terjadi dari tahun 2013. Terdapat tiga peristiwa

penting lainnya yang menjadi pemicu serangan-serangan militer yang dilakukan oleh Rusia, yaitu: a) protes oleh masyarakat Ukraina di tahun 2013 akibat gagalnya penandatanganan kerja sama dengan UE (McCarthy, 2013); b) aneksasi Krimea yang secara geografis merupakan bagian dari Ukraina di tahun 2014 dan dilanjutkan kegagalan dari Perjanjian Minsk II di tahun 2015 (Korovkin & Makarin, 2019; Bigg, 2022); dan c) ekspansi NATO ke bagian Timur (Statista Research Department, 2022a).

Pada 21 November 2013, protes besar-besaran dilakukan oleh masyarakat Ukraina, dikenal dengan '*Euromaidan protests*', karena keputusan tiba-tiba Pemerintah Ukraina di bawah kepemimpinan Presiden Viktor Yanukovych untuk menolak penandatanganan perjanjian *European Union-Ukraine Association Agreement* yang saat itu menjadi harapan masyarakat. Perjanjian yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan UE dibatalkan dan Ukraina berniat untuk berada dalam orbit Rusia (McCarthy, 2013). Saat itu, Rusia menawarkan bantuan finansial dan penurunan harga gas serta memperingatkan pemerintah Ukraina terhadap dampak keuangan yang akan dirasakan apabila masih melanjutkan kesepakatan kerja sama dengan UE (McCarthy, 2013). Protes Euromaidan ini berdampak pada turunnya Presiden Yanukovych sebagai presiden dan aneksasi Krimea pada tahun 2014 oleh Rusia dan gerakan separatist Rusia sebagai protes dari etnis minoritas Rusia di bagian timur Ukraina (Korovkin & Makarin, 2019). Gelombang protes Euromaidan ini menjadi tantangan besar bagi stabilitas negara Ukraina (Dragneva-Lewers dan Wolczuk, 2016). Di tahun yang sama, Perjanjian Minsk yang ditandatangani oleh Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman dengan tujuan agar gencatan senjata juga dilakukan, akan tetapi tidak diimplementasikan dengan baik (Bigg, 2022).

Kecenderungan pro-Barat kembali meningkat saat Volodymyr Zelensky terpilih menjadi Presiden Ukraina di tahun 2019 (Bigg, 2022). Kepemimpinan Zelensky dapat diakui cenderung berorientasi pada Barat dengan keinginannya untuk segera bergabung dengan UE dan NATO. Orientasi ke Barat ini juga

menjadi salah satu pemicu besar terhadap tindakan yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Alih-alih sebagai bentuk kekhawatiran akan ekspansi NATO dan dunia Barat ke bagian Timur, Rusia berusaha memproteksi diri dengan menjadikan Ukraina sebagai medan untuk memperingatkan dunia Barat. Keanggotaan Ukraina di NATO adalah ‘garis merah’ untuk Rusia karena hal itu berarti militer NATO sudah semakin dekat dengan perbatasan Rusia dan tentunya menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Rusia (Statista Research Department, 2022a).

Berdasarkan data Statista (2022), jumlah korban meninggal sudah mencapai 5.237 orang dengan korban luka sebanyak 7.035 orang sampai dengan 24 Juli 2022. Anak-anak juga turut menjadi korban dalam konflik ini. Konflik Rusia-Ukraina juga tentu mendapatkan reaksi dari berbagai negara di dunia. Negara-negara Barat, utamanya, mengancam keras aksi serangan atau yang Rusia katakan sebagai operasi militer. Sebagai respons, negara-negara Barat, seperti negara-negara anggota UE, Swiss, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, memberikan sanksi dan pembatasan untuk Rusia (Statista Research Department, 2022b). Pembatasan mencakup sektor finansial, individu yang berafiliasi dengan pemerintahan Rusia, dan ekspor produk teknologi tinggi ke Rusia. UE juga melarang penerbangan Rusia terbang di wilayah udara negaranya dan Jerman memberhentikan sertifikasi dari pipa gas *Nord Stream 2*. Tiongkok dan India memposisikan diri netral. Belarusia, Kuba, Iran, Myanmar, Syria, dan Venezuela menyatakan dukungannya terhadap Rusia (Statista Research Department, 2022b). Umumnya, dukungan ini muncul karena adanya hubungan dependen negara-negara tersebut terhadap sumber daya Rusia. Sementara Ukraina, negara tersebut masih berusaha mengaktivasi kembali kegiatan ekspor-impor untuk mendorong roda perekonomian negara. Ekspor biji-bijian dari Ukraina kembali dilakukan dengan menyiapkan kapal pertama Turki untuk transportasi barang setelah kesepakatan PBB-Turki dengan Rusia untuk dapat mengekspor biji-bijian di tengah konflik (Deutsche Welle, 2022).

Namun demikian, sanksi dan pembatasan yang diberikan pada Rusia bisa menjadi bumerang bagi negara-negara Barat akibat resolusi konflik yang belum tercapai. Sebagai contoh, Rusia dan Ukraina diketahui sebagai pemasok gandum terbesar di dunia di mana kedua negara tersebut menyumbang hampir seperempat dari jumlah ekspor global (Cohen & Ewing, 2022). Dampak dari konflik tersebut terhadap pasokan gandum tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Barat atau negara-negara maju yang memberikan sanksi kepada Rusia, tetapi juga negara-negara berkembang yang menggantungkan pasokan agrikulturnya kepada kedua negara tersebut. Untuk itu, pembahasan dan penanganan krisis melalui forum-forum multilateral harapannya dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mempercepat resolusi konflik dan mencapai titik damai, sehingga konsekuensi global dapat diminimalisasi.

Dampak Regional dan Global Konflik Rusia-Ukraina

Rusia dan Ukraina merupakan aktor kunci pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk sehingga posisi kedua negara dalam jejaring global sangat penting. Rusia menjadi mitra dagang terbesar kesembilan untuk kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2019. Total perdagangan Rusia dan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai 18,2 miliar dollar AS di tahun tersebut (ASEAN, 2020).

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, perang memberikan dampak yang krusial, seperti gangguan pada rantai pasok global, kenaikan harga energi, dan pangan. Di bidang energi, misalnya, harga bahan bakar di beberapa negara mengalami peningkatan. Dampak secara langsung terhadap perekonomian negara-negara di Asia Tenggara tentu saja dirasakan utamanya pada sektor minyak bumi. Struktur perekonomian global terganggu, sehingga perlu untuk dihadapi dengan melakukan restrukturisasi perekonomian global. Selanjutnya, dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat melalui tiga aspek (Siregar, 2022), yaitu: (1) sektor keuangan; (2) perdagangan; dan (3) sektor komoditas. Pada sektor keuangan, volatilitas

pasar keuangan domestik serta pembiayaan pemerintah dan dunia usaha akan meningkat. Berkaitan dengan hal ini, sikap bank sentral global yang lebih akomodatif akan mengurangi efek kejut di pasar. Pada sektor perdagangan, penurunan ekspor ke Rusia dan Ukraina memiliki dampak terbatas bagi Indonesia. Di sisi lain, sebagai negara pengekspor komoditas, kenaikan harga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nasional. Pada sektor komoditas, potensi kenaikan inflasi dari penyesuaian harga energi yang diatur pemerintah serta kenaikan harga pangan dapat meningkatkan ketegangan sosial. Akibatnya, Bank Indonesia diharapkan untuk lebih agresif dalam menormalisasi kebijakan. Hal lain yang perlu dicermati adalah kenaikan *administered price* akibat peningkatan harga energi dan pangan yang berpotensi menaikkan inflasi cukup signifikan. Hal ini berkaitan pula dengan ketetapan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali ke batas 3% pada tahun 2023.

Menurut OECD Economic Outlook (2022), banyak negara-negara OECD ekonominya sangat bergantung pada energi bahan bakar fosil dengan risiko guncangan harga yang tinggi dan bahkan kelangkaan. Rusia telah memasok lebih dari 40% gas alam sebagai produk impor Eropa hingga saat ini yang menjadi sumber utama pemanas bagi banyak rumah tangga UE, proporsi impor batu bara yang serupa, dan sekitar seperempat impor minyak. Pasokan gas juga merupakan sumber utama produksi listrik dengan peran kunci dalam menyeimbangkan permintaan dan pasokan dan sebagai input ke dalam produksi industri seperti pupuk. Meningkatkan keamanan pasokan energi di Eropa adalah usaha jangka menengah bagi Rusia. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas energi lain seperti minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan dan terhambatnya distribusi bahan baku pangan ke seluruh dunia turut mempengaruhi perekonomian global, sehingga pertumbuhan ekonomi global akan tertahan (Permana, 2022).

Dampak lain yang terlihat jelas adalah munculnya arus pengungsi (Al-Hamid, 2022). Kondisi konflik Rusia-Ukraina ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa dari rakyat Ukraina

dan mendorong mereka untuk meninggalkan negaranya dan mengungsi ke sejumlah negara tetangga, seperti Rumania, Hungaria, Polandia, Jerman, Slovakia, Moldova, dan Belarus (Al-Hamid, 2022).

Presidensi Indonesia di G20

Pada tahun 1999, *the Group of Twenty* (G20) dibentuk sebagai respons dalam menghadapi krisis keuangan yang terjadi di akhir tahun 1990-an dan sebagai kerangka kerja dalam mencegah instabilitas keuangan serta memelihara pertumbuhan global yang berkelanjutan dan lebih stabil (Gilman, 2015; Kirton, 2016). G20 kemudian berkembang menjadi sebuah forum yang tidak terbatas pada diskusi terkait isu-isu finansial (*Financial Track*), tetapi juga turut membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama (*Sherpa Track*). Forum ini mempertemukan banyak aktor baik negara maupun nonnegara, seperti para menteri, gubernur bank sentral, deputi, kelompok ahli, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, pebisnis, dan pemuda. Dalam konteks Hubungan Internasional, G20 merefleksikan sebuah mekanisme pemerintahan global (*global governance*) berbentuk forum yang berorientasi pada kerja sama internasional di mana para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan berdiskusi dan berbagi ide-ide lintas negara terkait masalah kebijakan serta mencari jalan keluarnya (Pal, 2012). Setiap tahunnya, masing-masing negara anggota memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin sekaligus tuan rumah dalam pertemuan G20.

Melanjutkan kepemimpinan Italia, Indonesia resmi menerima tongkat estafet kepresidenan G20 di tahun 2022. Di tengah kondisi pandemi global COVID-19, Indonesia mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*" dengan tiga pilar utama, yaitu: 1) Arsitektur kesehatan global; 2) Transformasi digital; dan 3) Transisi energi yang berkelanjutan. PRESIDENSI Indonesia dalam G20 menjadi sebuah tugas besar bagi pemerintah untuk menjalankan peran kepemimpinannya dalam menjawab tantangan dan melakukan pemulihan global secara konkret dan inklusif. Menurut Menteri

Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi (2021) pada *Media Briefing* Pertemuan Sherpa, prinsip inklusivitas perlu dikedepankan pada G20, dan untuk pertama kalinya, G20 mengundang perwakilan dari negara-negara Pasifik dan Karibia selain negara berkembang lainnya dari Afrika, ASEAN, dan Amerika Latin. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia memiliki peran besar dan penting dalam forum G20 ini, yaitu sebagai pen jembatan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk saling bertukar pikiran dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global.

Namun demikian, G20 dengan sifat dasarnya sebagai *global governance* tidak memiliki kekuatan penuh untuk memastikan bahwa apa yang dicapai secara konsensus dalam forum tersebut akan diimplementasikan secara menyeluruh oleh negara-negara anggotanya. Sifat pemerintahan global yang cair, terus-menerus, memerintah tanpa otoritas yang berdaulat, dan keterbatasan membawa apa yang diperhatikan dalam pemerintahan nasional ke tingkat internasional menjadikan forum ini terkadang dianggap sebagai “*talking shop*” dan menjadi sulit dalam mengakomodasi kepentingan dari kelompok negara maju dan negara berkembang (Rewizorski, 2017). Padahal, sebagai salah satu bentuk *global governance* terpenting yang ada di dunia saat ini (Hajnal, 2014), G20 memiliki cakupan (*coverage*) yang cukup besar.

Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia (G20, 2022). G20 berperan utama dalam penciptaan stabilitas ekonomi global, termasuk pencegahan terjadinya krisis finansial. Meskipun G20 bersifat tidak mengikat, rumusan kebijakan yang disepakati dalam forum-forum di G20 tetap diperhitungkan dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan di tingkat negara. Sejak penyelenggaraan KTT G20 pertama di Washington D.C. pada tahun 2008 hingga KTT tahun 2019, mengutip studi yang dilakukan oleh University of Toronto dalam Welch (2019), paling tidak terdapat 23 isu yang telah dibahas dan 194 komitmen yang nyata dan terukur, dengan tingkat kepatuhan rata-rata

mencapai 71%. Hal ini menunjukkan potensi besar G20 sebagai platform bagi Indonesia untuk memperkuat citra dan diplomasinya di mata dunia internasional.

Presidensi G20 memberi Indonesia ruang untuk dapat memaksimalkan perannya sebagai penengah, pen jembatan, perangkul, atau mediator dalam forum-forum yang diselenggarakan dalam G20. Lebih lanjut, Indonesia sebagai salah satu perwakilan dari negara berkembang dan satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota dalam G20 memiliki peran penting dalam mengakomodasi kepentingan negara berkembang sebagai negara pen jembatan dengan negara maju. Mendapatkan tanggung jawab keketuaan G20 di tahun 2022 merupakan salah satu kesempatan besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan peran dan kepentingan nasionalnya, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, utamanya dalam kapasitasnya sebagai kekuatan menengah.

Peran Indonesia sebagai Kekuatan Menengah di G20 di tengah Konflik Rusia-Ukraina

Dalam konteks Indonesia sebagai kekuatan menengah, Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang dapat memainkan peran yang bersifat merangkul, menjadi mediator, menjadi pen jembatan kepentingan (*bridge builder*), dan umumnya melakukan pendekatan dengan diplomasi kekuatan menengah dengan memanfaatkan jalur multilateral. Pada konteks Presidensi Indonesia di G20, konflik Rusia-Ukraina mendorong Indonesia sebagai pemimpin forum untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa kondisi geopolitik global tidak akan mengganggu pelaksanaan G20. Harapannya apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam memastikan forum berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif, dan karakter kekuatan menengah Indonesia. Terlepas dari urgensi Indonesia sebagai pemimpin G20 di tahun 2022, perhatian Indonesia terhadap konflik juga dapat dikatakan tidak terlepas dari status Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang juga dapat mengambil peran dalam hal

perdamaian, ketertiban, dan supremasi hukum (Spies, 2016). Menambahkan peran-peran tersebut, menurut Al-Fadhat (2022a), peran Indonesia sebagai kekuatan menengah juga mencakup peran sebagai pemimpin regional, penyalur suara negara-negara berkembang, advokasi demokrasi, dan negara pen jembatan. Dengan demikian, Indonesia, selain berupaya menjadi mediator maupun negara pen jembatan antara pihak yang berkonflik, juga memiliki tanggung jawab untuk menjembatani suara dan kepentingan negara berkembang lainnya akibat konflik tersebut.

Pada implementasinya, meskipun konflik masih terus terjadi dan keketuaan Indonesia sampai dengan dituliskannya artikel ini masih berjalan, Indonesia telah melakukan beberapa perannya sebagai upaya cepat tanggap dalam merespons konflik Rusia-Ukraina yang tidak dapat dipungkiri berdampak pada penyelenggaraan G20 tahun 2022. Pertama, Indonesia sejauh ini telah mengupayakan peran sebagai negara pen jembatan tanpa melupakan prinsip bebas aktif dengan usaha-usaha memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara miskin yang terdampak secara finansial dan komoditas akibat perang yang terjadi. 'Bebas' diartikulasikan oleh Indonesia dalam bentuk ketidakberpihakan negara terhadap satu kubu manapun yang berkonflik. Indonesia yang sebelumnya pernah memberikan suara 'mendukung' dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 2 Maret 2022 dalam memvonis Rusia sebagai penyebab konflik, kemudian, memberikan suara netral untuk menskors Rusia dalam pertemuan Dewan HAM PBB (Dharmaputra, 2022). Indonesia juga tetap berada pada keputusannya untuk tetap mengundang Rusia dalam pertemuan G20 di tengah tekanan dari negara-negara besar yang menolak kedatangan Rusia (Karman, 2022). Di sisi Ukraina, Indonesia juga telah menolak permintaan Ukraina untuk memberikan dukungan senjata karena tidak sejalan dengan prinsip bebas aktif Indonesia dan prinsip netralitas negara-negara Asia Tenggara (Reuters, 2022). Sementara itu, sebagai negara dengan kekuatan menengah, salah satu peran 'aktif' Indonesia adalah berupaya mengambil

peran mediator dan berusaha untuk memediasi konflik. Hal ini diwujudkan dalam kunjungan kenegaraan ke Ukraina pada 29 Juni 2022 dan Rusia pada 30 Juni 2022 dengan misi sebagai *peace broker* untuk konflik Rusia dan Ukraina dan sebagai upaya pencegahan terjadinya krisis pangan global terutama di negara-negara berkembang (Medina, 2022). Misi berjalan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat berbagai kritik terhadap strategi kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut. Pertanyaan publik terkait mengapa Indonesia mendatangi Ukraina terlebih dahulu dan kemudian baru Rusia menjadi perhatian tersendiri. Di tengah kritik terhadap langkah aktif Indonesia, Hanafi (2022) menyampaikan bahwa Indonesia perlu terus bersifat aktif dan dinamis dalam menciptakan kondisi yang kondusif di kedua negara tersebut. Langkah-langkah pertemuan baik secara bilateral dalam *sideline meeting* maupun multilateral dapat diusahakan oleh Indonesia dengan memanfaatkan forum multilateral G20 baik sebagai presidensi maupun anggota.

Dalam menjalankan politik bebas aktif dan perannya sebagai negara dengan kekuatan menengah, Indonesia dapat mengedepankan peran sebagai negara pen jembatan. Perhatian sebagai negara pen jembatan ini ditekankan pada bagaimana Indonesia dapat mengakomodasi dan menyuarakan kepentingan negara berkembang di tengah periode pemulihan pascapandemi COVID-19 yang juga diusung sebagai fokus dari agenda G20 tahun 2022 ini. Belum selesai dari masa pemulihan, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan terjadinya krisis pangan dunia dan kenaikan harga komoditas agrikultur dan energi yang akan merugikan negara-negara yang bergantung pada komoditas tersebut, termasuk negara-negara berkembang. Rusia dan Ukraina menyediakan 30% dari gandum dunia, seperlimanya adalah jagung, dan lebih dari setengah adalah minyak bunga matahari (Guterres, 2022). Sepertiga dari ekspor Ukraina dan Rusia menuju 45 negara Afrika dan negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap kenaikan harga minyak dan gas juga meningkatkan biaya pengadaan dan transportasi vaksin.

Selain itu, kondisi perang membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunda kunjungan inspeksi ke Rusia untuk mengevaluasi produksi Sputnik V (Aco, 2022). Dampak lainnya adalah ketidakpastian keberlanjutan penggunaan Sputnik V terutama di negara-negara Amerika Latin (Yustiningrum, 2022). Dengan demikian, kepentingan negara-negara berkembang ini patut menjadi perhatian dan Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang perlu mengambil langkah. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia dalam G20 telah mengambil langkah kunjungan ke Ukraina dan Rusia dengan salah satu fokus misi adalah dampak perang terhadap krisis pangan global.

Kedua, pertemuan secara bilateral maupun multilateral menjadi arena penting bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai *middle power* dalam merespons konflik ini. Memanfaatkan peran presidensi, Indonesia dapat mengatur dialog dan pertemuan dengan perwakilan negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat untuk membicarakan mitigasi konflik dan memastikan tidak ada fokus negara yang terganggu dalam G20 akibat perang. Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia dalam pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri di Bali pada 7-8 Juli 2022, menekankan bahwa multilateralisme adalah satu-satunya mekanisme di mana seluruh negara, besar atau kecil, dapat diperlakukan sama, dan seluruh suara baik negara maju maupun berkembang perlu didengar (Hung, Z., et.al., 2022). Dalam kesempatan presidensi, Indonesia juga dapat memainkan peran asertif sebagai pengingat prinsip-prinsip penting dalam berbangsa dan bernegara termasuk dalam mengatasi konflik. Multilateralisme dianggap sebagai cara untuk mendengarkan dan memedulikan kepentingan seluruh negara secara seajar. Melalui forum multilateralisme seperti G20, Indonesia dapat mengambil kesempatan melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara-negara lain di luar agenda G20 untuk melobi dan memastikan efektivitas agenda dan partisipasi aktif negara-negara yang menentang kehadiran Rusia. Sebagai contoh, pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia yang dilakukan pada pertengahan Pertemuan Menteri

Luar Negeri dengan membahas perjanjian perdagangan bebas, investasi, dan juga dampak perang Rusia-Ukraina (U.S Department of States, 2022). Meskipun tidak fokus membahas pada isu konflik, pertemuan ini dapat diartikan sebagai langkah positif Indonesia untuk membuka pembicaraan dan melihat pandangan terkini negara lain terkait konflik Rusia-Ukraina serta disrupsi geopolitik yang terjadi.

Ketiga, peran sebagai mediator. Indonesia telah memiliki berbagai pengalaman dalam melakukan mediasi konflik. Alexandra (2017) menjelaskan bahwa Indonesia, melalui kerangka ASEAN, memainkan peran penting dalam perdamaian konflik bersenjata dan mengakhiri okupasi Vietnam terhadap Kamboja yang terjadi sejak tahun 1978. Pada tahun 1988, sebagai upaya mediasi, Indonesia menjadi tuan rumah dalam *The Jakarta Informal Meeting I* dan dilanjutkan pada tahun 1989 dalam *The Jakarta Informal Meeting II* yang menghasilkan kesepakatan bersejarah, *Paris Peace Agreement* 1991, sebagai penanda berakhirnya Perang Vietnam-Kamboja. Selain itu, Indonesia juga pernah memainkan peran sebagai '*honest broker*' untuk memfasilitasi usaha damai dalam konflik antara Filipina dan kelompok separatis *Moro National Liberation Front* dari tahun 1970-1990an. Peran mediator dapat menjadi salah satu cara untuk Indonesia memainkan peran *middle power* dan memanfaatkan keketuaan G20. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya, Indonesia menawarkan sebagai penyampai pesan jika ada yang ingin disampaikan Ukraina kepada Rusia (Euractiv, 2022). Namun demikian, Indonesia perlu berhati-hati dalam menawarkan diri sebagai mediator konflik. Sejalan dengan Dharmaputra (2022), hal ini karena Indonesia tidak memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam konteks Eropa Timur. Berbeda halnya dengan Asia Tenggara, Indonesia memiliki kedekatan secara rumpun budaya dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Namun demikian, di balik harapan Indonesia yang dapat berperan aktif dalam merespons konflik terlebih saat masa kepemimpinan G20, Indonesia perlu mengelola ekspektasi kepemimpinannya. Menurut Winanti

(2022), Indonesia perlu mengelola ekspektasi dan perlu menyadari sepenuhnya sifat G20 yang *non-legally binding* dan *norm-setting*. Untuk itu, segala upaya Indonesia memanfaatkan keanggotaan dan kepemimpinannya di G20 tidak memberikan jaminan pasti bahwa Indonesia akan berperan besar dalam merespons konflik tersebut. Sifat G20 yang merupakan forum ekonomi dan isu-isu non-ekonomi yang telah ditentukan dalam Jalur Sherpa membuat Indonesia tidak memiliki celah besar ketika memanfaatkan forum. Hanya pertemuan-pertemuan informal yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Sifat G20 yang *non-legally binding* juga dapat berpotensi pada kurangnya komitmen negara-negara penentang Rusia untuk berpartisipasi aktif dalam forum. Indonesia paling tidak dapat berperan membujuk agar negara-negara anggota tetap berkomitmen dan menegosiasikan kepentingan nasionalnya.

Pemenuhan dan Perlindungan Kepentingan Nasional Indonesia

Prinsip “*foreign policy begins at home*” (Elisabeth, ed., 2016) menekankan Indonesia untuk dapat mengawal kepentingan nasionalnya dalam konteks global melalui kebijakan luar negerinya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjamin pemenuhan kebutuhan domestik sebagai komitmen hasil Presidensi G20. Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya alenia empat, tujuan negara sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perwujudan tujuan negara itu menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi disrupsi geopolitik saat ini.

Selain berupaya untuk menjadi negara pen jembatan dan juga membantu dalam pengelolaan konflik Rusia-Ukraina agar penyelenggaraan G20 tidak terganggu, perhatian terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam forum tersebut perlu menjadi perhatian utama.

Menurut Al-Fadhat (2022b), Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap dampak sosial-politik dari tiga isu prioritas yang diangkat dalam G20 2022 terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional, yang dijabarkan dalam distribusi vaksin COVID-19, perluasan ekonomi digital, dan transisi energi baru terbarukan. Ketiga isu prioritas tersebut memang ditujukan untuk peningkatan ekonomi, karena peran dan fungsi dari G20 adalah sebagai forum ekonomi global meskipun dalam perkembangannya isu-isu non-ekonomi juga turut dibahas dalam jalur berbeda. Namun demikian, tentu saja terdapat banyak pekerjaan rumah Indonesia sendiri yang perlu dibenahi. Bukan saja untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap implementasi hasil G20, melainkan juga yang lebih penting adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan nasional. Terutama, bagaimana dampak hasil G20 terhadap kesejahteraan dan keselamatan warga negara Indonesia.

Perwujudan tiga isu prioritas yang menjadi agenda pertemuan G20 2022 dikhawatirkan akan dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Beberapa kalangan juga telah menyebut beragam kemungkinan dampak perang terhadap perekonomian dalam negeri berbagai negara (Anggela, 2022), tidak terkecuali Indonesia. Meskipun tampaknya pengaruh konflik Rusia-Ukraina itu tidak separah dengan apa yang terjadi di beberapa negara Eropa, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi situasi terburuk di masa mendatang. Presidensi Indonesia di G20 dapat menjadi jalan untuk memitigasi kemungkinan krisis domestik akibat ketidakpastian dan disrupsi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global.

Salah satu upaya mitigasi yang telah dilakukan Indonesia adalah penguatan arsitektur kesehatan global, yang juga merupakan prioritas G20 tahun ini. Dalam konteks ini, presidensi di G20 juga memberikan Indonesia kesempatan mengakselerasi percepatan vaksin baik di dalam negeri maupun di level internasional melalui diplomasi multilateral. Di level domestik, Indonesia juga mendorong produksi vaksin dalam negeri. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan, saat ini telah dikembangkan vaksin Merah Putih yang

diprakarsai Universitas Airlangga, vaksin BUMN, vaksin yang diproduksi Bio Farma, dan vaksin Walvax (Okezone, 2022). Tentu saja dukungan terhadap vaksin buatan dalam negeri tersebut akan menguatkan kemandirian Indonesia dalam penyediaan vaksin COVID-19. Vaksin buatan Indonesia juga diharapkan kelak dapat diterima dan digunakan secara lebih luas atau global.

Namun demikian, menurut Yustiningrum (2022), selain vaksin, masih terdapat tantangan bagi penguatan arsitektur kesehatan global ke depan, terutama terkait infrastrukturnya. Misalnya, masih adanya kesenjangan kemampuan kesehatan antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah, keterbatasan suplai produk kesehatan, resistensi transfer teknologi dari produsen negara-negara maju yang mendominasi produksi vaksin, serta ketidaksiapan infrastruktur kesehatan negara berkembang. Oleh sebab itu, dalam Presidensi G20, Indonesia memiliki posisi strategis berperan serta dalam upaya pemerataan vaksin dan kesiapan infrastruktur kesehatan global. Jika distribusi vaksin dan infrastruktur kesehatan lebih merata, maka perekonomian dunia juga akan lebih cepat pulih. Dengan demikian, akan lebih kondusif juga bagi kegiatan perekonomian Indonesia, baik di dalam maupun ke luar negeri.

Al-Fadhat (2022b) berpendapat, selama ini kegiatan perekonomian dalam negeri Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan, misalnya masalah buruh. Selain itu, kebijakan pemerintah cenderung *market-oriented*, yang mendukung pertumbuhan bisnis dan aliran investasi demi mempertahankan stabilitas politik, untuk menjaga korporat besar dan *rent-seeking*. Kondisi tersebut dianggap kurang peka terhadap kepentingan masyarakat sipil, buruh, bahkan lingkungan (Al-Fadhat, 2022b). Dengan demikian, Indonesia sejatinya perlu membereskan isu-isu politik, ekonomi dan sosial dalam negerinya sendiri terlebih dahulu. Misalnya, dengan mendorong pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*no one left behind*).

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam Elisabeth (2016), pertumbuhan ekonomi inklusif mensyaratkan tiga pilar utama, yaitu:

(1) memaksimalkan kesempatan ekonomi yang ada; (2) memberikan jaring pengaman sosial; dan (3) menjamin tersedianya akses yang sama (*equal*) terhadap kesempatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang inklusif semakin relevan terutama ketika terjadi disrupsi geopolitik saat ini. Perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut dapat memicu terjadinya tekanan inflasi global yang memengaruhi pemulihan ekonomi di seluruh negara, terutama negara berkembang. Oleh sebab itu, peningkatan jaringan pengamanan sosial menjadi sangat penting, apalagi bagi kelompok rentan yang sensitif terhadap inflasi pangan maupun energi (Anggela, 2022).

Salah satu cara melindungi Indonesia dari dampak ekonomi akibat disrupsi geopolitik adalah perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap pelaku ekonomi dalam negeri. Agenda transformasi digital dalam G20 2022 dapat dihubungkan dalam upaya melindungi keberlanjutan usaha para pelaku ekonomi Indonesia. Penjabaran dari agenda tersebut di antaranya adalah pemanfaatan teknologi digital bagi pengembangan dan penguatan UMKM, terutama UMKM yang dijalankan perempuan. Meskipun tampaknya program ini ambisius, namun jika diupayakan dengan serius maka akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih cepat bangkit pascapandemi.

Dalam agenda Presidensi G20 2022, dukungan terhadap UMKM yang dikelola perempuan mendapat perhatian penting. Di Indonesia, pelaku UMKM didominasi perempuan, dan mereka telah mengadopsi teknologi digital lebih cepat, serta memiliki ketahanan untuk mengelola bisnis mereka secara formal (Yustiningrum, 2021). Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai Presidensi G20 2022 dengan mengangkat tiga prioritas terkait UMKM yang dikelola perempuan ini, yaitu: (1) meningkatkan *Key Performance Indicators* (KPI) kepemimpinan perempuan di sektor swasta; (2) memperkuat komitmen sektor swasta untuk meningkatkan UMKM yang dijalankan perempuan; dan (3) menerapkan *best practices* sektor swasta terhadap keterlibatan perempuan dalam ekonomi digital (Yustiningrum, 2021). Penguatan UMKM yang dikelola perempuan akan berkontribusi bukan saja terhadap

transformasi ekonomi digital, melainkan juga terhadap ketahanan Indonesia dalam mencegah dan mengatasi dampak ekonomi global akibat disrupsi geopolitik. Seperti yang diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (2021), “*Investing in woman means investing in peace.*”

Terkait dengan transisi energi baru terbarukan yang menjadi salah satu agenda prioritas G20, sebenarnya Indonesia masih sangat rendah dalam implementasi *green economy*. Apalagi Indonesia masih sangat bergantung pada industri manufaktur, kehutanan, tambang, dan otomotif, yang semuanya melibatkan kekuatan elit politik dan konglomerat (Al-Fadhat, 2022b). Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 memang dilematis. Indonesia secara moral perlu menunjukkan komitmen dan kapabilitasnya dalam mengimplementasikan hasil G20 terkait transisi energi ini, padahal kondisi Indonesia sendiri tampaknya masih perlu waktu lebih panjang untuk bisa mewujudkannya.

Namun demikian, konflik Rusia-Ukraina dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri. Sebagian negara Eropa telah merasakan dampak perang yang menyebabkan terhambatnya pasokan gas dari Rusia. Selain itu, beberapa negara Eropa dan Jepang juga telah menanggukuhkan pembelian minyak dan gas Rusia (Suwiknyo, 2022). Kenaikan harga minyak dan gas akibat perang menyebabkan risiko terjadinya inflasi dan krisis pangan. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi percepatan transisi energi baru terbarukan, mengingat energi yang bersumber dari fosil sangat terbatas dan cenderung rentan fluktuasi harga.

Untuk itu, diplomasi ekonomi Indonesia perlu mengacu pada dua elemen utama, yaitu *Green and Inclusive* (GI). Diplomasi GI tersebut perlu melibatkan kerja sama yang lebih luas secara global (Elisabeth, 2016). Dengan demikian, Presidensi Indonesia di G20 menjadi sangat strategis untuk memperjuangkan kerja sama multilateral, termasuk dukungan finansial dan teknologi, dalam akselerasi implementasi energi baru terbarukan secara global, termasuk di Indonesia sendiri.

Penutup

Merespons disrupsi geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang terjadi, Indonesia, sebagai negara kekuatan menengah, dapat berkesempatan memainkan peran di berbagai sisi. Sebagai presidensi G20, dalam menanggapi konflik yang terjadi, Indonesia telah berupaya dalam berperan dalam mengatur dialog, agenda perbincangan, dan pertemuan-pertemuan dengan perwakilan negara-negara lain termasuk negara-negara Barat untuk membicarakan mitigasi konflik berkepanjangan dan memastikan tidak ada fokus negara yang terganggu pada forum akibat perang. Selain itu, peran Indonesia sebagai negara penjembutan dilakukan dengan tidak meninggalkan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif yang tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara miskin yang terdampak perang, khususnya berkenaan dengan suplai komoditas dan finansialnya. Indonesia dengan berbagai pengalaman dalam mediasi konflik telah berupaya memainkan peran kekuatan menengah yang salah satunya adalah sebagai mediator dengan memanfaatkan keketuaan G20.

Memetik intisari berbagai jenis praktik diplomasi yang dapat dilakukan oleh negara dengan kekuatan menengah (Henrikson, 1997), studi ini melihat bahwa Indonesia telah berupaya memainkan peran untuk saling menghubungkan (*‘to interconnect’*), yakni sebagai negara penjembutan negara berkembang dan negara miskin agar kepentingan mereka tidak terabaikan di tengah disrupsi geopolitik, dan juga peran konsiliasi (*‘to conciliate’*) dengan tujuan menawarkan diri sebagai mediator, pembawa pesan, dan pemberi solusi di tengah konflik. Namun demikian, dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan dari negara-negara Barat yang posisinya terhadap konflik Rusia-Ukraina cenderung tidak dapat diubah. Tantangan keras terhadap kehadiran Rusia menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam periode keketuaannya di G20. Terakhir, berkenaan dengan perlindungan kepentingan nasional di tengah disrupsi geopolitik, Indonesia memiliki tugas untuk tetap memperhatikan kondisi

dalam negeri. Salah satu yang utama adalah memastikan hal-hal terkait perlindungan yang menyeluruh bagi pelaku ekonomi dalam negeri terhadap dampak ekonomi akibat disrupsi geopolitik dan memastikan kepentingan tersebut terakomodasi dalam forum G20, khususnya dalam memanfaatkan statusnya sebagai negara berkekuatan menengah dan pemimpin G20.

Daftar Pustaka

- Aco, H. (Ed.). (17 Maret 2022). *Vaksin Sputnik V Buatan Rusia Dievaluasi WHO Gara-gara Perang*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/03/17/vaksin-sputnik-v-buatan-rusia-dievaluasi-who-gara-gara-perang?page=2>, diakses pada 2 Agustus 2022.
- Al-Fadhat, F. (2022a). Indonesia's G20 middle power status and the balance of global power. Hasil wawancara mendalam pada 17 Juni 2022.
- Al-Fadhat, F. (2022b). Indonesia's G20 Presidency: Neoliberal Policy and Authoritarian Tendencies. *Australian Journal of International Affairs*, 1–7. <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2070598>
- Al-Hamid, R. (2022). Pergeseran Kebijakan Integrasi Imigran Uni Eropa Terhadap Imigran Timur Tengah-Afrika dan Ukraina. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(2), 611-624. Retrieved from <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/761>
- Alexandra, L. A. (2017). Offering Support and Sharing Experiences: Indonesia's Approach to Peacebuilding. Dalam: Charles T. Call dan Cedric De Coning (Eds.), *Rising Power and Peacebuilding: Breaking the Mold?* (hlm. 39-68). Palgrave Macmillan.
- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 151–168. <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Anggela, N. L. (20 Juni 2022). *Perang Rusia vs Ukraina diprediksi bakal tahunan, dampaknya ke Indonesia?* Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220620/9/1545822/perang-rusia-vs-ukraina-diprediksi-bakal-tahunan-dampaknya-ke-indonesia>, diakses pada 2 Agustus 2022.
- ASEAN. (2022). *ASEAN-Russia Economic Relations: Overview*. ASEAN. <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-russia-economic-relations/>, diakses pada 22 Oktober 2022.
- Beeson, M. dan Higgott, R. (2014). The Changing Architecture of Politics in the Asia-Pacific: Australia's Middle Power Moment?, *International Relations of the Asia-Pacific*, 14 (2), 215–237.
- Bigg, M. M. (18 Februari 2022). *A timeline of the tensions between Russia and Ukraine*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/02/18/world/europe/russia-ukraine-timeline.html>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Bryman, A. (2008). The end of the paradigm wars? Dalam Perti Alasuutari, Leonard Bickman dan Julia Brannen (Eds.), *The Sage Handbook of Social Research Methods* (hlm. 13-25). Sage Publications.
- Cohen, P., & Ewing, J. (21 Februari 2022). *What's at stake for the Global Economy as Conflict Looms in Ukraine*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/02/21/business/economy/Russia-Ukraine-economy.html>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Cooper, A. F., Nossal, K. R., & Higgott, R. A. (1993). *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Cooper, D. A. (2011). Challenging Contemporary Notions of Middle Power Influence: Implications of the Proliferation Security Initiative for "Middle Power Theory". *Foreign Policy Analysis*, (7), 317–336.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications.
- Deutsche Welle. (2022). *Russia-Ukraine updates: Zelenskyy condemns attack on POW prison*. DW. <https://www.dw.com/en/russia-ukraine-updates-zelenskyy-condemns-attack-on-pow-prison/a-62635107>, pada 31 Juli 2022.
- Dharmaputra, R. (16 Juni 2022). *How will Indonesia deal with Russia and Ukraine at the G20?*. Indonesia at Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/>

- how-will-indonesia-deal-with-russia-and-ukraine-at-the-g20/, pada 31 Juli 2022.
- Dragneva-Lewers, R., & Wolczuk, K. (2016). *Ukraine between the Eu and Russia: The integration challenge*. London: Palgrave Macmillan.
- Elisabeth, A. (Ed.). (2016). *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Emmerson, D. K. (2012). Is Indonesia Rising? It Depends. Dalam Anthony Reid (Ed.), *Indonesian Rising: The Repesioting of Asia's Third Giant* (hlm. 49 – 76). ISEAS Publishing.
- Euractiv. (30 Juni 2022). *Indonesian president offers to take message from Zelenskyy to Putin*. Euractiv. <https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/indonesian-president-offers-to-take-message-from-zelenskyy-to-putin/>, diakses pada 31 Juli 2022.
- G20. (2022). *Presidensi G20 Indonesia – Isu Prioritas*. G20 Indonesia 2022. <https://g20.org/id/home-2/>, diakses pada 9 Juni 2022.
- G20. (2022). *Tentang G20*. G20 Indonesia 2022. <https://g20.org/id/about-the-g20-2/>, diakses pada 10 Juni 2022.
- Gilman, M. (2015). A world without G20 Summits. Dalam: Marina Larionova & John J. Kirton (Eds), *The G8-G20 Relationship in Global Governance* (hlm. 45-54). Ashgate.
- Guterres, A. (12 April 2022). *The War in Ukraine: A Silent Assault on the Developing World*. United Nations. <https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2022/“-war-ukraine-silent-assault-developing-world”>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Hajnal, P. I. (2014). *The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Hammersley, M. (2013). *‘What is’ qualitative research?*. Bloomsbury.
- Hanafi, M. I. (2022). Penguatan Peran Indonesia dalam G20. Hasil wawancara mendalam pada 16 Juni 2022.
- Henrikson, A. K. (1997). Middle Powers as Managers: International Mediation within, across, and outside Institutions. Dalam Andrew F. Cooper (Ed.), *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War*. Macmillan Press.
- Holbraad, C. (1971). The Role of Middle Powers. *Cooperation and Conflict*, 6 (1), 77–90.
- Hung, Z., Xin, L. & Yunyi, B. (8 Juli 2022). *China stresses true multilateralism at G20 FM’s meeting amid US attempt to split bloc over Russia-Ukraine conflict*. Global Times. <https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270104.shtml>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers. *Politikon*, 30(2), 165-181.
- Karman, M. M. (10 April 2022). *How Indonesia, as G20 host, can be mediator between Russia and Ukraine*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/04/10/how-indonesia-as-g20-host-can-be-a-mediator-between-russia-and-ukraine.html>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Kirton, J. J. (2016). *G20 Governance for a globalized world*. Routledge.
- Korovkin, V., & Makarin, A. (2019). *Conflict and Inter-Group Trade: Evidence from the 2014 Russia- Ukraine crisis*. American Economic Review. <https://www.aeaweb.org/conference/2020/preliminary/paper/a7iY2dBr>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Kusumaningprang, R. M. (2017). The Roots and Evolution of Indonesia’s Middle Power Activism. *The Indonesian Quarterly*, 45(2), 152 – 179.
- Krueger, A. (2004). *Economic Growth in a Shrinking World: The IMF and Globalization, Address by Anne Krueger, Acting Managing Director, IMF*. IMF. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp060204>, pada 24 Oktober 2022
- Larasati, C., & Natasya, E.D. (2017). Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 147 – 159.
- Marsudi, R. L. P. (7 Desember 2021). *Media Briefing Sherpa Meeting Presidensi G20*. Sekretariat Presiden. <https://www.youtube.com/watch?v=14JzmJhLOKM>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Marsudi, R. L. P. (29 Oktober 2019). *Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024*. Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas-politik-luar-negeri-republik-indonesia-2019-2024>, diakses pada 27 Juli 2022.

- Marsudi, R. L. P. (6 Januari 2021). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021*. Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/ Pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021>, diakses pada 27 Juli 2022.
- Medina, A. F. (1 Juli 2022). *Indonesia's President Becomes First Asian Leader to Visit Ukraine and Russia, Since Conflict*. ASEAN Briefing. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-president-becomes-first-asian-leader-to-visit-ukraine-and-russia-since-conflict/>, diakses pada 30 Juli 2022.
- McCarthy, N. (11 November 2013). *Protests Reveal Divided Ukraine*. Statista. <https://www.statista.com/chart/1710/protests-reveal-divided-ukraine/>, diakses pada 30 Juli 2022.
- OECD Economic Outlook. (2022). *Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine*. OECD Publishing.
- Okezone. (10 November 2021). *4 Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia*. Okezone. <https://edukasi.okezone.com/detail/774234/4-vaksin-covid-19-buatan-indonesia>, diakses pada 2 Agustus 2022.
- Pal, L. A. (2012). *Frontiers of Governance: The OECD and Global Public Management Reform*. Palgrave Macmillan.
- Permana, S. H. (2022). Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia. *Info Singkat Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan*, 14(5), 19-24.
- Reuters. (29 April 2022). *G20 host Indonesia urges Zelenskiy, Putin to 'forge peace'*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/g20-host-indonesia-urges-zelenskiy-putin-forge-peace-2022-04-29/>, diakses pada 30 Juli 2022.
- Rewizorski, M. (2017). G20 and the development of a New Global Governance Mechanism. *International Organisations Research Journal*, 12 (3), 32–52. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-32>
- Robertson, J. (2017). Middle-power definitions: confusion reigns supreme. *Australian Journal of International Affairs*, 71 (4), 355-<http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2017.1293608>, 355-370.
- Sandelowski, M. (2004). Using Qualitative Research. Dalam Michael Lewis-Beck, Alan Bryman, dan Tim Futing Liao (Eds.), *The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods* (hlm. 893-894). Sage.
- Santikajaya, A. (7 Maret 2013). *Emerging Indonesia and its Global Posture*. East Asia Forum. <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/07/emerging-indonesia-and-its-global-posture/>, diakses pada 1 Agustus 2022.
- Siregar, A. E. (2022). *Konflik Rusia-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia*. Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45).
- Sriyanto, N. (2018). Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's Middlepowermanship in the East Asia Region. *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.14203/jkw.v9i1.784>.
- Statista Research Department (20 Juli 2022a). *Russia-Ukraine War 2022 – statistics and facts*. Statista. <https://www.statista.com/topics/8922/russia-ukraine-conflict-2021-2022/#dossierKeyfigures>, diakses pada 31 Juli 2022.
- Statista Research Department (29 Juli 2022b). *Russia-Ukraine War 2022 – statistics and facts*. Statista. <https://www.statista.com/topics/9087/russia-ukraine-war-2022/#dossierKeyfigures>, diakses pada 31 Juli 2022.
- Susanto, J. (2022). Indonesia di G20: Konteks, Pendekatan dan Tantangan Kontemporeranya. Hasil wawancara mendalam pada 20 April 2022.
- Suwiknyo, E. (9 Maret 2022). *Jepang, Eropa dan Inggris Boikot Pasokan Energi dari Rusia!*. Bisnis. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220309/19/1508462/jepang-eropa-dan-inggris-boikot-pasokan-energi-dari-rusia>, diakses pada 2 Agustus 2022.
- U.S. Department of States. (8 Juli 2022). *Secretary Blinken's Meeting with Indonesian Foreign Ministry Marsudi*. State.gov. <https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-indonesian-foreign-minister-marsudi/>, diakses pada 31 Juli 2022.
- Welch, D. A. (2019). "Are G20 Summits Worth It?". G20 Information Centre. <http://www.g7g20.utoronto.ca/comment/190703-welch.html>, diakses pada 9 Juni 2022.
- Winanti, P. S. (2022). Penguatan Peran Indonesia dalam G20. Hasil wawancara mendalam pada 19 Mei 2022.

Yustiningrum, E. (2022). G20 dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengenai Arsitektur Kesehatan Global. Hasil wawancara mendalam pada 17 Juni 2022.

Yustiningrum, E. (23 November 2021). *Indonesia's G20 Presidency: Advantages from within*. Pusat Riset Politik BRIN. <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/indonesias-g20-presidency-advantages-from-within/>, diakses pada 27 Juli 2022